**BAB I**

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Masalah Penelitian

Ilmu hubungan internasional umumnya dianggap sebagai disiplin ilmu politik, tetapi juga merupakan tema penelitian sejarah (internasional atau diplomasi) dan ekonomi (ekonomi internasional). Berakhirnya Perang Dingin bukan berarti berakhirnya persaingan politik, ideologi, diplomasi, ekonomi, teknologi, atau bahkan kekuatan militer di antara bangsa-bangsa di dunia. Ini mengalihkan masalah keamanan seperti lingkungan, keamanan energi, keamanan pangan, ekonomi, perdagangan, perdagangan manusia, terorisme dan pemberontakan, dan pemanasan global menjadi masalah keamanan non-tradisional keamanan tradisional. Perkembangan masalah ini juga bersumber dari globalisasi dan interaksi antar bangsa yang semakin terbuka untuk mengatasi masalah politik, ekonomi dan sosial budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti negara teluk adalah negara yang termasuk kawasan teluk persia, seperti oman, qatar, bahrain dan kuwait dimana negara-negara tersebut cenderung lebih liberal dengan misi mereka mengembangkan ekonomi lalu israel melihat peluang dengan dorongan amerika serikat upaya Israel mendorong perbaikan hubungan dengan negara-negara Teluk ini muncul di saat Amerika Serikat mendorong sanksi lebih berat untuk Iran. di sisi lain, Presiden AS Donald Trump terang-terangan memperkuat hubungan AS dengan Arab Saudi yang di masa pemerintahan Barack Obama sedikit mendingin. Sejauh ini, Arab Saudi belum berkomentar tentang kunjungan sederet pejabat Israel ke negara-negara Arab Teluk. Peneliti geopolitik Timur Tengah Saluud Heflueh menilai, meski upaya Israel memperbaiki hubungan dengan negara tetangganya sudah lama dilakukan, tetapi perebutan pengaruh antara Iran di satu sisi dengan AS, Israel, dan negara Teluk di sisi lain, memicu upaya ini ke level yang berbeda. Sudah puluhan tahun Israel dan negara-negara Teluk melakukan pembicaraan secara tertutup, setidaknya hal ini sudah dimulai sejak 1980-an. Namun, para pemimpin negara Arab tidak pernah mempublikasikan pertemuan-pertemuan ini karena khawatir bakal menjadi bumerang jika dikaitkan dengan konflikPalestina-Israel. (Bob cliffers, 2018)

Istilah normalisasi sering menjadi perbincangan di dalam ranah politik internasional di era saat ini. Sejarah dari kata normalize yang didiskripsikan sebagai “a return to normalcy” muncul semenjak tahun 1800 di bidang ilmu kesehatan. Namun istilah normalisasi terus berkembang sampai politik internasional sebagai sebuah konsep didalam hubungan diplomatik negara. Menurut Abar Barston, normalisasi diartikan sebagai proses mewujudkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengakhiri konflik lewat beberapa cara seperti genjatan senjata, perjanjian damai, atau membangun hubungan diplomatik. (Samantha, 2016)

Barston menambahkan : “Normalisation is seen as a process involving; the recognition of the need for measure to reduce tension or friction, and their introduction; promotion of improved relations; and isolation, containment or resolution – wholly or partly – of major sources of dispute or tension.Dalam kasus perdamaian antara dunia Arab dengan Israel, Arab Saudi merupakan pihak yang mengupayakan perdamaian dengan Israel dapat terealisasikan di Timur Tengah. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk membentuk hubungan yang normali tanpa perselisihan antara negara Arab dengan Israel. Berdasarkan catatan sejarah di Timur Tengah, upaya normalisasi dari Arab ( R.P Barston,2018)

Saudi sempat tercipta atas inisiatif Pangeran Fahd, yaitu the Fez plan3 di tahun 1982. Meskipun upaya normalisasi awal tidak mendapat perhatian internasional, Raja Salman lewat Arab Peace Initiative (API) ditahun 2002 kembali memperlihatkan keinginan Arab Saudi melakukan normalisasi dengan Israel. Sebagai instrumen normalisasi, API berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama dari negara anggota Liga Arab, tidak seperti inisiatif the Fez plan sebelumnya. Keberadaan API sebagai instrumen perdamaian utama antara negara Arab dengan Israel diterima oleh keseluruhan negara anggota Liga Arab ditahun 2007 karena isinya yang menjamin kemerdekaan rakyat Palestina sebagai syarat utama normalisasi yang harus dikabulkan Israel.4 Syarat tersebut menjadikan posisi Palestina sebagai penentu proses normalisasi berlangsung beberapa tahun kemudian. Hal tersebut terbukti ketika terjadinya Perang Libanon II ditahun 2006 dan Cast Lead Operation yang dilakukan Israel ditahun 2008.5 Operasi yang lebih dikenal sebagai “Pembantaian 1477 warga Gaza” ini membuat proses normalisasi terhambat karena kecaman negara Arab terhadap aktifitas politik luar negeri Israel dalam kasus tersebut.6 Dari kecaman tersebut dapat terlihat bagaimana Arab Saudi dengan negara Arab lainnya memprioritaskan keamanan warga di tanah Palestina ketimbang yang lainnya sebagai syarat proses normalisasi antar negara. (yevzleh, 2020)

Sikap proaktif normalisasi yang dilakukan Arab Saudi mendapatkan kecaman dari negara Arab lainnya, baik dari pihak kelompok negara, maupun individu. Sebagai kelompok yang pernah didukung oleh Arab Saudi sampai tahun 2004, Hamas merupakan salah satu kelompok yang mengecam sikap proaktif yang ditunjukan Arab Saudi tersebut. Meskipun memiliki misi untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina, pandangan Arab Saudi dan kelompok Hamas memiliki perbedaan dalam mencapainya. Kelompok gerakan Boycott, Divestment, and Sanction Gulf (BDS Gulf) di tiap negara teluk Arab merupakan kelompok lainnya yang menyayangkan aktivitas dari Arab Saudi terhadap Israel tersebut. Kritikan dari gerakan ini terhadap pemerintahan Arab Saudi muncul ketika konferensi tingkat regional pertama kalinya di kawasan negara teluk Arab yaitu di Kuwait.11 Kegiatan tersebut dihadiri beberapa figur publik, aktifis, dan figur politik dari berbagai negara di kawasan negara teluk Arab. Dari dalam negeri, kecaman juga muncul dari kalangan ulama besar Arab Saudi yaitu Safar al-Hawali yang sejak dari dulu menentang keberadaan tentaraA.S. di Teluk Arab dan pernah menentang pemerintahan Arab Saudi. (Mbida, 2018)

Arab Saudi sempat menahan Al-Hawali dari tahun 1994-1999 karena hal tersebut.12 Namun penangkapan di tahun 2018 beserta keluarga al-Hawali dikarenakan penentangan intensifnya normalisasi Arab Saudi dengan Israel yang mengabaikan kepentingan Palestina didalam bukunya yang berjudul Muslim and Western Civilization dengan perkembangan normalisasi yang dilakukan Arab Saudi, prioritas kepentingan kerajaan Arab Saudi pada tahun 2015-2018 sebagai pengupaya normalisasi menjadi sebuah pertanyaan di dalam dinamika normalisasi. Prioritas kepentingan tersebut terlihat jelas terutama dengan berlanjutnya proses normalisasi meski adanya kecaman yang datang dari publik Saudi sendiri. Proses desekuritisasi yang dilakukan kerajaan Arab Saudi perlu untuk dianalisis untuk mengenali lebih lanjut kepentingan tersebut.(fahd et al, 2020)

Keputusan untuk kembali melakukan normalisasi hubungan diplomatik merupakan momen penting dalam sejarah hubungan Israel dan Negara arab Teluk. Terlebih, mengingat selama ini hubungan keduanya selalu diwarnai dengan ketegangan pasca insiden Gaza Flotilla Raid, dimana Israel melakukan operasi milter dan penyerangan terhadap iring-iringan 6 kapal sipil yang berada di wilayah laut internasional. Iringiringan kapal tersebut dipimpin oleh Kapal Mavi Maramara sebagai kapal utama berbendera Arab, lalu terdapat dua kapal lainnya yang juga berbendera Turki, dua kapal berbendera Qatar, dan satu kapal berbendera Kanada.

Kehadiran Trump secara langsung dalam pengumuman kesepakatan normalisasi hubungan UEA-Israel di atas tidak dapat dilepaskan dari kepentingan Trump menjelang pemilihan presiden (pilpres) AS yang akan digelar pada November 2020. Trump yang sedang berjuang untuk memenangkan kembali pilpres AS membutuhkan dukungan suara, termasuk dari masyarakat AS yang mendukung kebijakannya di Timur Tengah. Dukungan suara itu sangat dibutuhkan Trump di tengah merosotnya popularitas presiden AS itu, yang antara lain disebabkan oleh kebijakannya yang tidak efektif dalam penanganan pandemi Covid-19 dan meluasnya unjuk rasa terkait rasisme (kurhser, 2019)

Peripheral Pact terbukti dapat bertahan lama dan menguntungkan Israel, namun Israel tetap berhati-hati agar tidak bergantung sepenuhnya pada perlindungan Peripheral Pact dan Amerika Serikat. Untuk itu, Israel juga mengembangkan industri pertahanan berteknologi tinggi dan jaringan intelijen yang rumit. Akibatnya, posisi negara-negara di Timur Tengah juga berubah dalam menyikapi Israel. Dengan kemajuan teknologi, proliferasi rudal dan Weapon of mass destruction (WMD), Israel dapat mengandalkan kekuatan sendiri untuk menghadapi ancaman baru yang muncul di Timur Tengah. (zayyad et al, 2020)

Selain itu dengan menggunakan konsep kepentingan nasional, resolusi konflik, dan kebijakan luar negeri, penulis berpendapat bahwa tidak ada perubahan signifikan dari politik luar negeri Turki, yang ada hanyalah dinamika yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ekonomi, militer, dan politik. Shared idea adalah instrumen penting yang penulis coba tekankan, dimana hasil analisa akan bersifat lebih ideasional dan berbeda dengan pendekataan yang berfokus hanya pada instrumen material. Penulis tidak mengabaikan faktor material namun pengembangan shared idea justru adalah faktor terpenting dalam menciptakan kesamaan visi.

**1.2** **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengajukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepentingan israel di dalam melakukan normalisasi dengan Negara teluk ?
2. Bagaimanakah peran amerika serikat dalam mendorong terjadinya normalisasi antara Negara arab dan Israel ?
3. Bagaimana dampak normalisasi Israel dengan Negara teluk terhadap geopolitik kawasan timur tengah ?

**1.3** **Pembatasan Masalah**

Mengingat masalah yang akan diteliti memiliki lingkup yang luas, maka dalam peroses analisisnya penulis membatasi masalah berdasarkan perspektif regional arab dan meneliti dalam aspek keamanan, geopolitik dan ekonomi di timur tengah hingga terjadi suatu proses normalisasi

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang penulis lakukan, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

**“Bagaimana dampak dari normalisasi Israel dengan Negara teluk terhadap dinamika politik timur tengah ?”**

## 1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.5.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepentingan Israel ditimur tengah
2. Untuk mengetahui dampak kebijakan tersebut terhadap dinamika keamanan dan poltik di timur tengah

**1.5.2** **Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan terkait berbagai aspek di dalam konflik internasional, khususnya antara Israel dan Negara-negara arab
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap disiplin ilmu hubungan internasional.
3. Untuk menambah pengalaman dan wawasan serta melaksanakan penelitian yang berpedoman pada metode-metode penelitian ilmiah sekaligus dalam rangka implementasi pengetahuan yang diperoleh oleh penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.